

Judul : Puteri Minta Kemenkeu Perkuat IT, SDM, Institusi
Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dukung Reformasi Perpajakan Puteri Minta Kemenkeu Perkuat IT, SDM, Institusi



Puteri Anetta Komarudin

PEMERINTAH kembali mengupayakan agenda reformasi di bidang perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sejatinya, reformasi perpajakan ini juga perlu didukung penguatan institusi, kapasitas SDM, basis data dan proses bisnis, hingga teknologi. Untuk itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya penguatan kapasitas teknologi dan informasi (*information technology*) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung agenda tersebut.

Sejalan agenda reformasi fiskal yang dipersiapkan Pemerintah, kata Puteri, kemari, penting bagi Kemenkeu untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan informasi secara memadai dan andal. Khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran sentral dalam mengejar target penerimaan negara.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan penambahan dukungan anggaran sebesar Rp 992,78 miliar pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2022. Ini ditujukan untuk penguatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara.

Anggaran ini di antaranya untuk pengembangan *Core Tax Administration System, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0*, Sistem Informasi DJP (SIDJP), dan sistem lainnya. Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kemenkeu Tahun 2022 mencapai Rp 44,012 triliun.

"Kita investasikan anggaran untuk membangun sistem," urai Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (22/9) yang lalu.

Lantaran, hal ini tidak terlepas dari *core tax system* karena ini menyangkut penerimaan juga. Pihaknya, lanjut Sri, sudah meminta kepada DJP dan DJBC nanti kalau sampai terintegrasi bisa dilakukannya. "Jadi, jangan sampai membangun dua sistem yang kemudian ternyata tidak bisa terintegrasi di antaranya keduanya," jelasnya.

Puteri juga menekankan pada Pemerintah agar pengembangan aplikasi CEISA 4.0 ini dapat meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai, serta mencegah risiko *downtime* yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. ■ KAL